

STUDI LITERATUR: E-MONEY SEBAGAI INSTRUMEN KUANTITATIF DALAM KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

A Literature Study on E-Money as a Quantitative Instrument of Monetary Policy in Indonesia

Meilana Widyaningsih

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Meilana.widyaningsih@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan uang elektronik (e-money) sebagai instrumen kuantitatif dalam kebijakan moneter di Indonesia melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Dalam era digitalisasi, transformasi sistem pembayaran telah berkembang pesat dan mengubah pola konsumsi serta struktur sistem keuangan nasional. Studi ini memanfaatkan berbagai sumber literatur sekunder untuk mengevaluasi bagaimana e-money berdampak terhadap inklusi keuangan, perilaku konsumsi, sistem pembayaran nasional, serta stabilitas moneter. Hasil studi menunjukkan bahwa e-money memiliki potensi signifikan dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, terutama dalam memperluas basis moneter dan mendukung pengendalian inflasi. Namun, efektivitasnya sebagai instrumen kuantitatif bergantung pada pengawasan, regulasi, dan sinergi antara otoritas moneter dan pelaku industri keuangan digital.

Kata Kunci: E-money, kebijakan moneter, studi literatur, instrumen kuantitatif, sistem pembayaran digital

Abstrack

This study aims to examine the application of electronic money (e-money) as a quantitative instrument in monetary policy in Indonesia through a qualitative approach based on literature review. In the digitalization era, the transformation of the payment system has developed rapidly, altering consumption patterns and the structure of the national financial system. This study utilizes various secondary literature sources to evaluate how e-money impacts financial inclusion, consumer behavior, the national payment system, and monetary stability. The findings indicate that e-money holds significant potential in supporting the effectiveness of monetary policy, particularly in expanding the monetary base and contributing to inflation control. However, its effectiveness as a quantitative instrument depends on supervision, regulation, and synergy between monetary authorities and digital financial industry players.

Keywords: E-money, monetary policy, literature review, quantitative instrument, digital payment system

PENDAHULUAN

Dalam dunia nyata, kebijakan moneter tidak dapat mengendalikan permintaan agregat secara presisi karena adanya guncangan eksternal dan keterlambatan dalam transmisi kebijakan. Kebijakan aktif yang menyesuaikan instrumen kebijakan seperti suku bunga dan belanja pemerintah untuk merespons perubahan ekonomi seringkali dihambat oleh data yang lambat tersedia, proses pengambilan keputusan

yang memakan waktu, dan dampak yang muncul secara bertahap. Sebagai alternatif, diterapkan pendekatan berbasis aturan seperti *Constant Growth Rate Rule*, *Inflation Targeting*, dan *Taylor Rule*, yang bertujuan menjaga stabilitas dengan menetapkan pedoman tetap dalam mengatur kebijakan moneter.

Instrumen utama dalam kebijakan ini mencakup uang primer, suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan tarif pajak, sementara target yang ingin dicapai adalah inflasi rendah, pengangguran minimal, dan pertumbuhan ekonomi stabil. Meski kebijakan berbasis aturan dapat meningkatkan kredibilitas dan mengurangi ketidakpastian, pelaksanaannya tetap menghadapi kendala seperti variabel yang sulit dikendalikan, serta dinamika ekspektasi masyarakat yang bisa berubah. Contohnya, fenomena *time inconsistency* menunjukkan bahwa pembuat kebijakan cenderung menyimpang dari rencana awal setelah ekspektasi publik terbentuk. Meski begitu, kepercayaan publik (*credibility*) terhadap komitmen bank sentral memainkan peran penting dalam efektivitas kebijakan.

Dewasa ini dunia mengalami perkembangan pesat teknologi dalam bidang keuangan digital dan tidak terpungkiri hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Perkembangan *financial technology* tidak serta merta begitu saja terjadi namun juga dibersamai dengan antusias masyarakat berbagai kalangan dan usia yang sudah memiliki literasi terkait *technology* pada umumnya. *Financial Technology* (FinTech) merupakan inovasi berbasis teknologi yang dikembangkan dalam sektor keuangan guna mempercepat, mempermudah, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan secara lebih efisien dan nyaman (Aswirah, dkk, 2024).

Antusias masyarakat dan perkembangan *financial technology* tersebut memiliki banyak dampak pada perekonomian negara serta berbagai gaya hidup pada masyarakat. Dampak-dampak yang terjadi penting untuk dikaji karena menyebabkan perubahan masif dalam system bisnis suatu negara dan dunia global. Seiring dengan dorongan pemerintah terhadap penggunaan uang elektronik untuk berbagai keperluan seperti pembayaran tol, tiket kereta, dan akses ke tempat wisata milik negara, tanpa disadari, peran uang tunai sebagai alat pembayaran resmi mulai tergantikan oleh kartu digital yang menawarkan kepraktisan dan keamanan lebih dalam penggunaannya (Kusuma dan Asmoro, 2020).

Kebijakan e-money yang diterapkan oleh Bank Indonesia diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap sektor perekonomian, khususnya yang akan berkembang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut dampak-dampak yang kemungkinan akan muncul seiring dengan penerapan kebijakan e-money secara komprehensif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan bersumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi Bank Indonesia, peraturan pemerintah, dan publikasi media terpercaya antara tahun 2020–2025. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait keterkaitan e-money dengan kebijakan moneter, inklusi keuangan, dan perilaku konsumsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan moneter adalah instrumen yang dimanfaatkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan berbagai variabel keuangan, seperti suku bunga dan jumlah uang beredar, guna menjaga stabilitas nilai mata uang terhadap pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal (Triana, Devi, dkk., 2024). Pemerintah menggunakan kebijakan moneter untuk menstabilkan ekonomi dengan mengontrol jumlah uang yang beredar, yang meliputi uang primer (M0), uang dalam arti sempit (M1), dan uang dalam arti luas (M2) (Sukmawati, Devah, dkk., 2024).

1. Tujuan Kebijakan Moneter

Sebagai bagian integral dari kebijakan makro, strategi kebijakan moneter berfokus pada pengendalian stabilitas nilai tukar mata uang. Jika stabilitas ekonomi terancam, kebijakan moneter hadir sebagai solusi pemulihan melalui serangkaian langkah stabilisasi. Namun, efektivitas pengendalian ini dapat terhambat oleh ketidakstabilan pengganda uang, perubahan kecepatan peredaran uang, serta evolusi mekanisme penyampaian kebijakan moneter (Sriyono, 2013).

Secara umum, tujuan utama kebijakan moneter yang pertama adalah menjaga kestabilan harga (mengendalikan inflasi) supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian tidak mengalami gejolak kemudian tujuan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga, kebijakan moneter dapat mendorong investasi dan konsumsi. Tujuan ketiga adalah menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja (menurunkan pengangguran) dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan tercipta lebih banyak kesempatan kerja.

Tujuan keempat adalah menjaga stabilitas nilai tukar (kurs). hal ini dilakukan terutama di negara dengan sistem kurs tetap atau terkelola, agar perdagangan internasional dan investasi tetap kondusif. Tujuan kelima kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas sistem keuangan supaya sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya tetap sehat dan tidak memicu krisis ekonomi. Salah satu peran penting kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi, yaitu mempertahankan kestabilan harga (Rusanti, 2020).

2. Instrument Kebijakan Moneter

Dalam buku *Macroeconomics* karya Robert J. Gordon, instrumen kebijakan moneter utama meliputi:

a) Uang primer (High-powered money)

Merupakan komponen dasar dari uang beredar yang terdiri dari uang tunai yang dipegang oleh publik dan cadangan yang dimiliki bank di bank sentral. Bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang primer melalui operasi pasar terbuka.

b) Suku bunga jangka pendek, khususnya suku bunga *federal funds* (*Federal funds rate*)

Ini adalah tingkat bunga antarbank untuk pinjaman jangka pendek. Bank sentral (seperti The Fed) sering menggunakannya sebagai alat utama untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga mendorong konsumsi dan investasi, sedangkan kenaikan suku bunga bertujuan untuk meredam inflasi.

c) Operasi pasar terbuka (*Open market operations*)

Kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas di pasar uang. Membeli surat berharga menambah uang beredar, sedangkan menjualnya menguranginya.

d) Cadangan wajib (*Reserve requirements*)

Proporsi dana yang harus disimpan bank di bank sentral. Perubahan rasio ini memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

e) Fasilitas diskonto (*Discount rate*)

Merupakan suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank umum untuk pinjaman jangka pendek. Meskipun jarang digunakan secara langsung, perubahan suku bunga ini memberi sinyal arah kebijakan moneter.

3. E-money

E-money atau uang elektronik merupakan bentuk uang yang diubah ke dalam format digital, sehingga berfungsi layaknya dompet elektronik (Kusuma dan Asmoro, 2020). Tujuan utama penggunaan e-money adalah untuk kemudahan dan kepraktisan, di mana transaksi dapat dilakukan hanya dengan satu kali tekan tanpa perlu membawa uang tunai saat berbelanja. Namun, e-money pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menggantikan fungsi uang tunai. Pemegang kartu e-money sebaiknya memilih kartu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena banyak jenis kartu e-money yang tersedia di pasaran dengan berbagai fasilitas pembayaran yang berbeda. Selain itu, tidak semua pedagang menerima pembayaran melalui e-money, yang berarti belum ada kartu e-money yang dapat memenuhi semua kebutuhan transaksi.

Berbeda dengan kartu kredit atau kartu debit, kartu e-money tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi melalui Personal Identification Number (PIN) saat digunakan untuk pembayaran, dan tidak terhubung langsung dengan rekening bank nasabah. Hal ini disebabkan oleh sifat e-money yang merupakan produk *stored value*, di mana sejumlah nilai uang telah disimpan dalam alat pembayaran tersebut. Kondisi ini memungkinkan kartu e-money untuk dipindahtangankan dan digunakan oleh siapa saja selama saldo masih mencukupi. Namun, hal ini juga menimbulkan potensi risiko, karena jika kartu e-money hilang, saldo yang tersisa dapat digunakan oleh pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, pada Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa "Uang Elektronik (Electronic Money) adalah suatu alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbitnya." Nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam sebuah media seperti server atau chip, yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

1. E-money dan Inklusi Keuangan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya melalui hadirnya electronic money (e-money) sebagai instrumen pembayaran modern. E-money menawarkan kemudahan transaksi yang cepat, efisien, dan dapat diakses melalui perangkat digital seperti telepon seluler. Inovasi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tergolong *unbanked* dan *underbanked* yaitu mereka yang belum memiliki atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal.

Dalam konteks inklusi keuangan, e-money berfungsi sebagai jembatan antara teknologi dan layanan keuangan, memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk di wilayah terpencil, untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus bergantung pada infrastruktur perbankan konvensional. Biaya administrasi yang rendah, proses registrasi yang sederhana, serta dukungan dari berbagai platform digital menjadikan e-money sebagai solusi yang inklusif dan adaptif. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan literasi keuangan, kesejahteraan ekonomi, dan penguatan stabilitas sistem keuangan nasional.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan e-money sejalan dengan upaya pemerintah dan otoritas moneter dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperluas akses layanan keuangan melalui pendekatan digital, e-money berpotensi mendukung strategi nasional inklusi keuangan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang mendukung literasi digital dan perlindungan konsumen sangat penting agar pemanfaatan e-money dapat memberikan dampak positif yang optimal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

2. E-money dan Perubahan Perilaku Konsumen

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam perilaku konsumsi masyarakat, terutama dalam hal metode pembayaran. Adopsi instrumen pembayaran digital seperti uang elektronik (e-money), dompet digital (e-wallet), dan QRIS telah mempercepat peralihan dari sistem tunai (cash-based) ke sistem nontunai (cashless). Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, volume transaksi pembayaran digital mencapai 43,5 miliar, tumbuh 36,1% secara tahunan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital.

Kemudahan akses dan kecepatan transaksi yang ditawarkan oleh pembayaran digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Penelitian oleh Afifah & Yudiantoro (2022) menunjukkan bahwa penggunaan uang digital dapat meningkatkan perilaku konsumtif yang tidak terkendali dan mengubah budaya konsumsi masyarakat pedesaan. Selain itu, studi lain menemukan bahwa penggunaan e-money mempengaruhi frekuensi, jumlah, dan jenis barang yang dibeli oleh konsumen, dengan kecenderungan melakukan transaksi impulsif dan memanfaatkan promosi yang ditawarkan.

Dalam konteks ekonomi makro, perubahan gaya belanja ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, peningkatan konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Namun, di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai, pola konsumsi yang terlalu konsumtif dapat memicu permasalahan keuangan pribadi, seperti utang konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi yang bijak di era ekonomi digital.

3. Pengaruh E-money terhadap Sistem Pembayaran Nasional

Transformasi sistem pembayaran dari uang fisik ke digital telah menjadi fenomena global yang tak terelakkan, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

didukung oleh penetrasi internet yang luas, telah mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke metode pembayaran digital. Bank Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2024, volume transaksi pembayaran digital mencapai 43,5 miliar, meningkat sebesar 36,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adopsi yang semakin luas terhadap sistem pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu indikator utama dari transformasi ini adalah pertumbuhan signifikan dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pada tahun 2024, volume transaksi QRIS melonjak sebesar 175,2% secara tahunan, didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS. Selain itu, transaksi uang elektronik (e-money) juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,6 kuadriliun sepanjang Januari hingga Agustus 2024, meningkat 35,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin nyaman dan terbiasa menggunakan metode pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari.

Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumen, tetapi juga mendorong perubahan dalam infrastruktur sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia telah mengimplementasikan BI-FAST, sebuah sistem pembayaran ritel yang memungkinkan transfer dana secara real-time, dengan volume transaksi mencapai 3,4 miliar pada tahun 2024, tumbuh 62,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang efisien, aman, dan inklusif, sejalan dengan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dengan demikian, transformasi dari uang fisik ke digital tidak hanya meningkatkan kenyamanan transaksi, tetapi juga memperkuat fondasi sistem keuangan nasional yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

4. Dampak E-money terhadap Perbankan Konvensional dan Syariah

Transformasi digital dalam sektor keuangan Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sistem pembayaran. Pada tahun 2024, volume transaksi e-money meningkat 41,7% menjadi Rp253,39 triliun, sementara nilai transaksi QRIS melonjak 175,4%. QRIS kini digunakan oleh 48,12 juta pengguna dan diterima oleh 31,61 juta merchant, menjadikannya metode pembayaran digital yang dominan di Indonesia. Selain itu, transaksi BI-FAST tumbuh 55,4% menjadi Rp1.760,59 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dalam sistem pembayaran ritel real-time.

Meskipun adopsi e-money menunjukkan pertumbuhan pesat, bank tradisional tetap memainkan peran penting dalam sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia mencatat bahwa sektor perbankan Indonesia tetap solid dan optimis meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi

global dan tantangan domestik pada tahun 2024. Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, dan BCA terus memperkuat layanan digital mereka untuk bersaing dengan fintech dan e-money. Mereka menawarkan layanan mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan platform pembayaran digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berorientasi digital.

Secara keseluruhan, meskipun e-money menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam transaksi digital, bank tradisional tetap menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Indonesia. Kedua sektor ini saling melengkapi, dengan e-money menyediakan solusi pembayaran yang cepat dan mudah, sementara bank tradisional menawarkan layanan keuangan yang lebih luas dan mendalam. Kolaborasi antara kedua sektor ini diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ke depan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk. (2024) menunjukkan bahwa variabel e-money dan BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pemanfaatan e-money yang semakin meluas serta kebijakan moneter yang tercermin melalui tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan penggunaan e-money dalam aktivitas transaksi harian masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem pembayaran, yang pada gilirannya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada analisis yang dilakukan oleh Rahmi, dkk. (2024) diperoleh hasil bahwa Penggunaan uang elektronik turut mendukung upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas moneter. Melalui transaksi digital, Bank Indonesia dapat memantau pola konsumsi masyarakat secara langsung dan real-time, sehingga potensi tekanan inflasi dapat diidentifikasi lebih awal. Hal ini memungkinkan instrumen kebijakan moneter, seperti penyesuaian suku bunga acuan, untuk diterapkan secara lebih efektif karena perubahan tersebut segera berdampak pada biaya transaksi digital, yang kemudian memengaruhi perilaku konsumsi dan keputusan investasi. Selain itu, pergeseran dari uang tunai ke uang elektronik mengurangi kebutuhan akan pencetakan dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran.

Selanjutnya Rahmi, dkk. (2024) juga menjelaskan bahwa Dalam konteks stabilitas sistem keuangan, adopsi transaksi digital yang cepat dan aman berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional serta mitigasi risiko penipuan. Uang elektronik juga menjadi sarana strategis dalam mendorong inklusi keuangan, karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terakses oleh layanan perbankan konvensional. Dengan demikian, digitalisasi transaksi melalui uang elektronik memiliki dampak luas terhadap efektivitas kebijakan moneter, efisiensi ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa peningkatan penggunaan uang elektronik (e-money) terbukti memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) dalam perekonomian. Hal ini mencerminkan bahwa seiring dengan meningkatnya transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat, terjadi penambahan likuiditas yang masuk ke dalam sistem keuangan nasional. E-money memfasilitasi perputaran uang secara lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya turut menambah volume uang yang beredar, baik dalam bentuk simpanan maupun alat pembayaran.

Suwarni (2021) menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang elektronik yang beredar belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Meskipun demikian, penggunaan transaksi digital berpotensi menjadi landasan pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia, baik selama masa pandemi Covid-19 maupun di masa yang akan datang. Muzakky dan Indrawati (2022) juga menyampaikan bahwa volume transaksi E-money menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam jangka panjang, namun hanya memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan dalam jangka pendek, berdasarkan data dari kuartal I 2015 hingga kuartal IV 2021.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan efisiensi dalam sistem pembayaran, tetapi juga menandai transformasi perilaku ekonomi masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi nontunai. Karena sifatnya yang praktis dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, e-money memperluas basis pengguna layanan keuangan yang pada gilirannya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, e-money berperan sebagai instrumen yang mendorong ekspansi moneter secara tidak langsung.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzakky dan Indrawati tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, volume transaksi e-money berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara dalam jangka pendek pengaruhnya tetap positif namun tidak signifikan. Pertumbuhan volume transaksi uang elektronik dalam jangka panjang belum menunjukkan korelasi yang kuat dengan peningkatan kinerja ekonomi (Qori'ah, dkk. 2020). Lomboan (2024) Penggunaan e-money berkorelasi positif, meskipun tidak secara signifikan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lebih jauh, implikasi dari pertumbuhan uang elektronik terhadap jumlah uang beredar juga menuntut perhatian khusus dari otoritas moneter. Bank sentral perlu terus memantau dinamika ini agar dapat mengelola stabilitas moneter dengan tepat, terutama dalam mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat peningkatan likuiditas yang tidak disertai dengan pertumbuhan output riil. Oleh karena itu, e-money tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga bagian dari indikator penting dalam pengelolaan kebijakan moneter modern.

KESIMPULAN

Penggunaan uang elektronik (*e-money*) seperti OVO, GoPay, dan ShopeePay tidak secara langsung termasuk ke dalam instrumen utama kebijakan moneter konvensional seperti operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, atau fasilitas diskonto. Namun demikian, *e-money* memiliki keterkaitan erat dengan pengendalian jumlah uang beredar (*money supply*), sehingga dari sisi fungsional lebih dekat dengan instrumen kuantitatif, khususnya dalam konteks pengaturan likuiditas dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *e-money* merupakan bagian dari agregat moneter, baik dalam kategori M1 maupun M2. Secara konseptual, M1 mencakup uang kartal (uang kertas dan logam) serta uang giral (seperti dana dalam rekening tabungan yang dapat digunakan secara langsung melalui kartu debit). Sementara itu, M2 mencakup M1 ditambah dengan deposito berjangka, tabungan, dan instrumen likuid lainnya, termasuk *e-money* dalam pengertian yang lebih luas.

Dengan demikian, *e-money* berperan penting dalam dinamika sistem moneter modern meskipun tidak diklasifikasikan sebagai instrumen kebijakan moneter tradisional. Secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

M1 = uang kartal (uang kertas & logam) + uang giral (rekening tabungan yang bisa langsung digunakan seperti kartu debit).

M2 = M1 + deposito berjangka, tabungan, dan instrumen likuid lain, termasuk *e-money* dalam arti luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Yudiantoro, D. (2022). Pengaruh gaya hidup dan penggunaan uang elektronik terhadap perilaku konsumtif. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 365–375.
- Antara News. (2024, Desember 20). *BI hadirkan tiga layanan baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4543034/bi-hadirkan-tiga-layanan-baru-bi-fast-mulai-21-desember-2024>
- Antara News. (2025, Januari 15). *Bank Indonesia catat transaksi QRIS Rp80,88 triliun pada Januari 2025*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4668501/bank-indonesia-catat-transaksi-qr-is-rp8088-triliun-pada-januari-2025>
- Antara News. (2025, Januari 15). *Transaksi keuangan digital 2024 melesat, QRIS melonjak 175,2 persen*. <https://money.kompas.com/read/2025/01/15/201000426/transaksi-keuangan-digital-2024-melesat-qr-is-melonjak-175-2-persen>
- Aswirah, D., dkk. (2024). Perkembangan dan dampak financial technology terhadap inklusi keuangan di Indonesia: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(2).
- Bank Indonesia. (2024, Agustus 3). *Statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (SPIP)*. Diakses dari situs Bapenas.

- Bank Indonesia. (2024, Desember 20). *BI Fast bisa digunakan untuk transaksi massal mulai 21 Desember 2024*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-fast-bisa-digunakan-untuk-transaksi-massal-mulai-21-desember-2024>
- Bank Indonesia. (2025, Januari 15). *Transaksi keuangan digital 2024 melesat, QRIS melonjak 175,2 persen*. Kompas.com.
- Bank Indonesia. (2025, Januari 15). *Transaksi pembayaran digital mencapai 43,5 miliar pada 2024*. <https://money.kompas.com/read/2025/01/15/201000426/transaksi-keuangan-digital-2024-melesat-qris-melonjak-175-2-persen>
- Bank Indonesia. (2025, Januari 15). *Volume transaksi pembayaran digital mencapai 43,5 miliar pada 2024*. IDNFinancials.
- Charisma, R., & Suprpti, S. (2020). Pola konsumsi masyarakat perkotaan berdasarkan penggunaan e-money. *Proceedings of the 3rd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP)*, 1790–1799.
- Kalbuadi, K., & Yanthi, M. D. (2021). Analisis pengaruh peluncuran sistem e-money dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(1), Kediri, Juni 2021.
- Katadata. (2024, September 5). *Nilai transaksi uang elektronik capai Rp1,6 kuadriliun pada Januari–Agustus 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/673216a38c1bc/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp16-kuadriliun-pada-januari-agustus-2024>
- Katadata. (2025, Februari 5). *Uang elektronik mulai memimpin transaksi belanja di Indonesia*. Databoks.
- Kompas.com. (2025, Januari 15). *Transaksi keuangan digital 2024 melesat, QRIS melonjak 175,2 persen*. Kompas.com.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan financial technology (fintech) berdasarkan perspektif ekonomi Islam. *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2), Desember 2020.
- Muzakky, M. A., & Indrawati, L. R. (2022). Analisis pengaruh penggunaan e-money dan variabel moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015–2021. *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 10(2), Mei–Agustus 2022.
- Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014.
- Puspitasari, A. N. F., dkk. (2021). Analisis pengaruh transaksi pembayaran non tunai terhadap jumlah uang beredar M1 di Indonesia tahun 2009–2019. *Jurnal EMBA*, 9(2), 523–532.
- Putri, N. S., dkk. (2024). Pengaruh penggunaan e-money, BI rate dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 12(1), Januari–April 2024.
- Rahmi, C., dkk. (2024). Dampak perkembangan uang elektronik terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam perspektif sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), Agustus 2024.

-
- Rusanti, E., dkk. (2020). Instrumen studi komparatif kebijakan moneter konvensional dan Islam dalam pengendalian inflasi. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Sriyono. (2013). Strategi kebijakan moneter di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP)*, 1(2), 111–236.
- Sukmawati, D., dkk. (2024). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), Juni 2024.
- Suwarni, E. (2021). Dampak peningkatan jumlah uang elektronik (e-money) beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik (SoBAT) ke-3*, Bandung, 16 Oktober 2021.
- Triana, D., dkk. (2023). Penerapan kebijakan ekonomi moneter Islam pada sistem perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), Juni 2024.